BELANJA MODAL DI PROVINSI BANTEN BESERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Dirvi Surya Abbas¹⁾, Arry Eksandy²⁾, Imam Hidayat³⁾, Nadia Larasati⁴⁾

^{1,2,3,4)}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan I Babakan No.33, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec.Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, Indonesia

E-mail: ¹⁾abbas.dirvi@gmail.com, ²⁾arry.eksandy@yahoo.com, ³⁾imam_accounting@yahoo.com

⁴⁾nadia.larasati21@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Periode waktu penelitian yang digunakan adalah 4 tahun yaitu periode 2015-2018. Populasi penelitian ini meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. periode 2015-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 4 Kabupaten dan 4 Kota. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa agar pemerintah dapat mampu memaksimalkan usahanya dalam menggali sumber – sumber pendapatan dari setiap daerahnya, hal tersebut didasarkan agar anggaran yang dialokasikan dapat mampu terserap ke setiap daerah dengan efektif dan efisien sehingga setiap daerah dapat mampu memenuhi akan kebutuhan belanja modalnya.

Kata kunci: Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

CAPITAL EXPENDITURE IN BANTEN PROVINCE WITH INFLUENCING FACTORS

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of local taxes, levies, general allocation funds, special allocation funds on capital expenditures, in regencies / cities in Banten province. The research time period used is 4 years, namely the 2015-2018 period. The population of this study includes all districts / cities in Banten Province. 2015-2018 period. The sampling technique was using purposive sampling technique. Based on the predetermined criteria, it was obtained 4 districts and 4 cities. The type of data used is secondary data obtained from the Regional Budget Realization Report. The analysis method used is panel data regression analysis. The results showed that local taxes and levies have a positive effect on capital spending, while general allocation funds, special allocation funds have no effect on capital spending. Local Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds, Special Allocation Funds together have an effect on capital expenditure. Based on the results of the data testing carried out, it can be concluded that in order for the government to be able to maximize its efforts in exploring the sources of income from each region, this is based on so that the allocated budget can be absorbed into each region effectively and efficiently so that each region can meet the capital spending needs.

Keywords: Capital Expenditures, Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds, Special Allocation Funds

Article History: Received: 23 Agt 2020 Revised: 28 Okt 2020 Accepted: 01 Nop 2020

PENDAHULUAN

Pengalihan dana menurut Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber menurut APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam membantu membiayai kegiatan khusus di daerah dan sesuai dengan prioritas nasional adalah fungsi dari DAK. Pendanaan ini lebih difokuskan dalam pembiayaan untuk kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum terserap dengan maksimal atau untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah (Hendaris & Rahayu, 2012). Pentingnya peran belanja modal dalam percepatan peningkatan kesejahteraan publik sebagai wujud dari *good governance* pemerintah.

Adanya dampak positif meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

pengaruhi oleh pengembangan infrastruktur industri di setiap daerah memberikan kemudahan dalam meningkatkan investasi sehingga akan dapat meminimalisir ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Pada dasarnya pajak asli daerah mencakup beberapa hal seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain (Kawedar & Dkk, 2008).

Dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas pelayanan serta fasilitas publik, maka masyarakat akan merasa nyaman sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lancar dan nyaman, dengan begitu besaran jumlah pendapatan pajak di daerah dapat terserap dengan baik terutama dalam pembangunan. Pesatnya perkembangan pembangunan diharapkan nantinya menjadi peningkatan sikap kemandirian daerah dalam membiayai aktivitasnya, terutama dalam hal keuangan. produktivitas masyarakat di daerah sangatlah mempengaruhi tentang peningkatan di daerah perekonomian dengan seiring meningkatnya pendapatan per kapita.

Tabel 1. Realisasi PAD dan Belanja Langsung Kabupaten/kota di Provinsi Banten
Periode 2015-2018 (dalam Ribu)

Realisasi	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Total Rata - Rata / Tahun	TOTAL 2015-2018
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Pajak daerah	42.396	45.778	57.954	59.606	51.433	88.173
Retribusi daerah	5.876	4.770	3.486	3.832	4.491	10.646
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.205	1.078	1.176	1.230	1.172	2.283
Lain-lain PAD yang sah	13.396	16.171	26.935	18.778	18.820	29.567
Total PAD	62.873	67.797	89.551	83.447	75.917	130.670
Realisasi Belanja Langsung						
Belanja Barang dan jasa	49.584	60.050	72.813	77.839	65.072	109.634
Belanja Pegawai L	4.613	-	-	-	1.153	4.613
Belanja Modal	49.279	53.531	57.652	55.637	54.025	102.811
Total Belanja Langsug	103.476	113.581	130.465	133.476	120.250	217.057

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Dalam penggunaan pendapatan daerah, pemerintah daerah masih belum mengoptimalkan untuk pengeluaran belanja modal hal ini dapat kita lihat dari data Tabel 1 bahwa Total rata-rata Belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi) periode 2015-2018 sebesar 120.050 atau setara dengan 54% dari total rata-rata Belanja Langsung pada Provinsi Banten sedangkan total rata-rata Belanja Modal periode 2015-2018 sebesar 133.476 atau setara dengan 45% dari total rata-rata Belanja Langsung pada Provinsi Banten.

Berdasarkan Tabel 1. Pajak Daerah mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Dengan rata-rata pendapatan tahun 2015-2018 sebesar 484.202 dari Total Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota Provinsi Banten. Pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan di kabupaten/kota Provinsi Banten. Pendapatan Retribusi Daerah di kabupaten/kota Provinsi Banten memiliki nilai yang tidak begitu besar, semakin tinggi retribusi daerah semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal.

Pemerintah daerah Provinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerahnya dengan lebih tegas dan berkreaitivitas dalam pemungutan retribusi daerah, guna meningkatkan pembangunan dan infrastruktur daerah agar terciptanya kemandirian daerah.

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten & Kota di Provinsi Banten cenderung naik setiap tahunnya. Penyerapan Dana Alokasi Khusus masih rendah pada daerah perkotaan hal ini sangat disayangkan karena Dana Alokasi Khusus di daerah tersebut belum optimal dan berdampak pada pengalokasian Belanja Modal yang rendah. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 1. Mengenai realisasi DAU & DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Gambar 1. Realisasi DAU & DAK Kabupaten/Kota Provinsi Banten Periode 2015-2018 (dalam ribu)

Pada Gambar 1. diatas juga dapat dilihat bahwa Kabupaten Lebak memiliki Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya yang artinya Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan alokasi Belanja Modal tiap tahunnya dan semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian di Kabupaten Pandeglang.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Provinsi Banten dapat mengoptimalkan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah guna meningkatkan Pembangunan yang ada pada setiap daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil pengamatan melalui data yang sudah dikumpulkan dan ditelaah bahwasanya selama ini Pemerintah Daerah Banten lebih banyak memfokuskan pendapatan daerah untuk pengeluaran belanja operasi dibandingkan kepada pengeluaran belanja modal. Adapun pengeluaran belanja operasi yang dimaksud disini ialah tentang pengeluaran belanja yang jika dilihat dari

segi manfaat dan secara kasar manfaatnya kurang begitu berdampak dalam kepentingan publik, terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Seharusnya pemerintah Provinsi Banten lebih memfokuskan anggarannya ke dalam sektor belanja modal sehingga sangat bermanfaat dan produktif sehingga dapat memberikan pelayanan kepada publik secara lebih maksimal. Pada dasarnya selain terdapatnya pembaharuan akan tahun data serta adanya perbedaan alat uji analisis yang digunakan dengan peneliti sebelumnya, peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini pemerintah mau dapat menjadikan penelitian ini sebagai indikator tingkat keberhasilannya terutama dalam hal menuntaskan permasalahan pengalokasian anggaran yang terjadi didalam setiap daerah provinsi Banten. Dengan adanya pendapatan yang lebih besar diharapkan pemerintah tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap pemerintah Pusat, dan diharapkan alokasi DAU dan DAK dapat terfokuskan untuk biaya Belanja Modal guna mensejahterakan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Teori Stewardship

Pada dasarnya teori ini menjelaskan bagaimana situasi manajemen bahwasanya tidaklah termotivasi atas Kepentingan pribadinya, melainkan lebih mengedepankan kepada pencapaian utama kepentingan organisasi. (Donaldson dalam Davis, 1991).

Dapat diartikan bahwa teori ini pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana seharusnya Pemerintah Daerah sebagai suatu instansi yang dapat dipercaya dapat bertindak dan mengedepankan kepentingan publik dengan melalui program kerjanya dengan tepat, dengan ruang lingkup seperti membuat pertanggungjawaban keuangan

yang diamanahkan instansi tersebut, dengan begitu pencapaian tujuan instansi tersebut dalam meningkatkan ekonomi, kualitas pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. bahwsanya terciptanya suatu keberhasilan pemerintah daerah dalam usahanya untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah pastinya akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran belanja daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola pengeluaran biaya belanja dengan efektif dan efisien.

Teori Stakeholder

Selain teori Stewardship, teori yang mendasari penelitian ini ialah teori Stakeholder. teori Stakeholder ini menjelaskan bahwa adanya unsur dengan melibatkan banyak pihak baik dari semua golongan, contohnya seperti para pemegang saham, investor, pemerintah, masyarakat sekitar dari berbagai lingkungan, lembaga diluar perusahaan atau Instansi, dan sebagainya. Terlepas apakah golongan tersebut memiliki pengaruh maupun tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung didalam masyarakat (Hadi, 2014).

Adanya proses dalam organisasi tentunya memiliki pencapaian. Proses dapat tercapainya suatu tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh suatu keputusan dan kinerja suatu kelompok ataupun individu. Suatu kelompok atau individu tersebut biasa disebut sebagai Stakeholder. Dengan kata lain bahwa, Teori Stakeholder menjelaskan ialah suatu sekelompok orang, komunitas atau masyarakat, yang terdiri dari berbagai golongan dari berbagai elemen profesi, suku dan budaya, yang bersatu menjadi suatu kelompok dengan memiliki pemikiran yang sejalan demi memantapkan pencapaian

tujuan suatu organisasi agar tercapai sesuai dengan harapan.

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan tata kelola pemerintah, maka realisasi pendapatan yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan realisasi belanja yang lebih efisien. Dengan demikian keduanya (Pendapatan dan Belanja) dapat menjelaskan kekuatan Teori Stakeholder dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi. Pemerintah diharapkan mampu memainkan peranan dan membuka peluang memajukan daerah banten dengan menumbuh kembangkan serta menggali seluruh potensi yang ada dan mengendalikan aset-aset strategis sebagai sumber pendapatan daerah banten dan mampu menetapkan Belanja Daerah secara wajar, efisien, dan efektif.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pajak daerah pada dasarnya bersumber dari hasil aktivitas operasi sektor industri dalam berbagai jenis bidang usaha yang bertempat di daerah tersebut. naik atau turunnya penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri yang berada di daerah tersebut. Nyatanya tingkat optimalisasi sektor industri berasal dari hasil belanja modal. Agar dapat memstimulasi dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional maka penetapan alokasi pada belanja modal haruslah direncanakan dengan sebaik mungkin. Hal ini menjelaskan secara tidak langsung tentang keterhubungan teori stewardship yang selalu menggambarkan tentang keterkaitan yang kuat antara kesuksesan target organisasi dengan kepuasan masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan dari realisasi pendapatan Pajak Daerah yang dapat mempengaruhi perkembangan dan

peningkatan pembangunan suatu di suatu daerah guna untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hasbullah, 2017) menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut menginterpretasikan bahwasanya pendapatan berupa pajak daerah dapat mempengaruhi penganggaran belanja pemerintah atau dengan bahasa lainnya yakni *tax-spend hypothesis*. selain itu hasil penelitian tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jati, Subowo. Ilmiyana et.al. (2019) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif. namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramlan & Dkk, 2016) yang hasilnya menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh negative terhadap belanja pemerintah. Berdasarkan hasil dari penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis yakni sebagai berikut :

H₁: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan daerah yang mencukupi dapat mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. meskipun bantuan dana dari pemerintah pusat diberikan untuk kegiatan aktivitas pemerintah daerah, maka pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Selain itu, pemerintah daerah harus dapat mampu mengoptimalkan potensi daerahnya agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat terealisasi (Ramlan & Dkk, 2016).

Karakteristik yang menggambarkan akan kemampuan suatu daerah agar dapat bisa berotonomi yakni berada didalam kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Banten sebagai daerah otonom harus mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan guna mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan Teori Stewardship yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu yang menggambarkan eksistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam hal menyejahterahkan masyarakatnya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ramlan & Dkk, 2016) menunjukkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan (Jennie, 2016) menunjukkan hasil bahwa Retribusi Daerah berpengaruh Negatif terhadap Belanja Modal. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan Retribusi Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut:

H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan dari daerah yang ternyata memiliki peran besar seperti PAD dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Dana perimbangan pada dasarnya adalah suatu konsekuensi yang terjadi dikarenakan adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari dana

perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah agar mampu mencukupi kebutuhan daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan demikian pasti terjadi transaksi transfer yang cukup signifikan dalam anggaran pendapatan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Agar dapat memberikan pelayanannya maksimal kepada publik, maka pemerintah daerah merealisasikan DAU melalui pengeluaran belanja modal.

Namun, nyatanya masih terdapat kesenjangan penggunaan DAU terhadap belanja modal di banyak daerah sehingga tidak meratanya pembangunan, sehingga DAU menjadi tidak efektif dan efisien. Kondisi seperti itu harus segera diperbaiki dan harus melakukan peningkatan pada DAU agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang layak dan baik kepada masyarakat melalui adanya Belanja Modal.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan Theory Stakeholder yaitu Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Sudika & Budiarta, 2017) dimana dijelaskan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan menurut Prasetya (2017) menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh Negatif terhadap Belanja Modal. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi Belanja

Modal juga meningkat, dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut :

H3: DAU berpengaruh terhadap Belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional.

Selain DAU sebagai salah satu indikator dana transfer yang mempengaruhi alokasi belanja modal, Pemerintah Daerah juga mengandalkan DAK sebagai salah satu dana perimbangan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Masih sama dengan dana perimbangan lain dimana masih Teori pengeluaran pemerintah disini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teori ini menjelaskan adanya satu tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan dengan cara melakukan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang melalui perencanaan, kebijakan dan pengaturan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan Theory Stakeholder yaitu Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder.

Hasil penelitian terdahulu oleh Ramlan & Dkk (2016) dimana dijelaskan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal (Napitu & Dkk, 2018) Dana Alokasi Khusus berpengaruh Negatif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut:

H4: DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal

METODE

Didalam rancangan penelitian ini digunakan suatu pendekatan dengan pendekatan kuantitatif, hal ini didasari karena data yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan sumber data berjenis sekunder yakni Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2015 sampai dengan 2018. Agar dapat menemukan konfirmasi jawaban atas dugaan-dugaan terkait dengan Belanja Modal di Provinsi Banten 2015-2018 yang di proksi dengan perhitungan dari pengeluaran anggaran.

Jenis penelitian ini termasuk kedalam model penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan faktor penyebab yang mempengaruhi perubahan perilaku atau fenomena oleh suatu peristiwa secara keseluruhan sudah terjadi.

Didalam penelitian ini terdapat suatu pengujian hubungan kausal atau pengujian tentang pengaruh dari masing-masing variabel yang terdiri dari variabel eksogen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, terhadap variabel endogen yaitu Belanja Modal pada Provinsi Banten periode 2015-2018.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah ditentukan data yang akan digunakan didalam penelitian ini maka, tahap selanjutnya akan dilakukan uji analisis deskriptif.

Pengujian data berikutnya bertujuan untuk mendapatkan model analisis yang tepat, sehingga dapat digunakan dalam tahap pengujian analisis regresi berikutnya. Penentuan agar mendapatkan model yang tepat

Uji Chow, pengujian data yang bertujuan untuk menemukan model yang lebih layak, dengan membandingkan antara model *common effect model (CEM)* dengan *fixed effect model (FEM)*. Dengan kriteria jika nilai Probabilitas Cross-Section $F > (0,05)$, maka Common Effect Model (CEM) yang digunakan, namun jika nilai Probabilitas Cross-section $F < (0,05)$, maka Fixed Effect Model (FEM) yang digunakan.

Tabel 2. Hasil Uji F-Statistik (Uji Chow)

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.361279	(7,20)	0.9141
Cross-section Chi-square	3.810205	7	0.8014

Sumber: Hasil Data Diolah *E-views 9*

Berdasarkan hasil uji Chow, maka didapatkan nilai Probabilitly Cross-Section F dan Cross-Section chi-square $> (0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Common Effect Model (CEM) lebih tepat digunakan dibandingkan Fixed Effect Model (FEM).

Uji langrage multipler (LM), pengujian data yang bertujuan untuk menemukan model yang lebih layak, dengan membandingkan antara model *fixed effect model (FEM)*. Dengan kriteria jika nilai Probabilitas (Prob.) Cross-Section Breush-pagan $> (0,05)$, maka Fixed Effect Model (FEM) yang digunakan, namun jika nilai Probabilitas (Prob.) Cross-section Breush-pagan $< (0,05)$, maka Random Effect Model (REM) yang digunakan.

Tabel 3. Hasil *Lagrange Multiplier (LM)*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided			
(all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.220944 (0.1361)	2.559651 (0.1096)	4.780595 (0.0288)

Sumber: Hasil Data Diolah *E-views 9*

Berdasarkan hasil uji *Lagrange Multiplier (LM)* didapatkan nilai *Probability (Prob.) Cross-section Breausch-pagan* $> (0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Common Effect Model (CEM)* lebih tepat digunakan dibandingkan *Random Effect Model (REM)*.

Uji asumsi klasik adalah suatu persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam pengolahan data analisis regresi yang menggunakan dengan pendekatan *Ordinary Least Squared (OLS)* dalam teknik estimasinya maka, dari itu penelitian ini dilakukan Uji asumsi klasik. Adapun 2 macam Uji asumsi klasik yang akan digunakan yakni untuk pengujian pertama adalah pengujian apakah terdapat gejala multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan, hal tersebut dapat diketahui dengan melakukan pengujian koefisien

korelasi antar variabel independen. Lalu, untuk pengujian kedua adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas di dalam model regresi yang digunakan. Adapun analisis Regresi pengujian hipotesa penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.

Didalam analisis regresi data panel terdapat hasil Uji F yang menjelaskan apakah model analisis regresi data panel yang digunakan layak atau tidak. Selanjutnya hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) menjelaskan seberapa besar pengaruh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan pembahasan terakhir dalam analisis regresi data panel yakni tentang pembahasan hasil Uji t yang menjelaskan tentang tingkat signifikansi tiap-tiap variabel eksogen secara parsial terhadap variabel endogen. Berikut adalah persamaan regresi data panel untuk membahas pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam bentuk gabungan data *time series* dan *cross section* (Sari, 2014).

$$CH = 1.569048 + 0.300074 PD + 0.243794 RD + 0.321198 DAU + 0.107260 DAK$$

Berdasarkan regresi data panel diatas dapat dilihat pengaruh dari variabel-variabel Independen (PD, RD, DAU, & DAK) terhadap variabel dependen (Belanja Modal), sedangkan makna dari persamaan regresi data panel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 1.569048. Hal ini mengindikasikan bahwa jika terdapat nilai-nilai pada variabel independen (variabel-variabel independen sama dengan 0) maka Belanja Modal memiliki nilai sebesar 1.569048. Nilai koefisien variabel Pajak Daerah (PD) sebesar 0.30007, berarti bahwa setiap peningkatan suatu pengungkapan Pajak Daerah maka Belanja Modal akan meningkat sebesar

0.30007 dengan asumsi independen lainnya bernilai konstan (tetap).

Nilai koefisien variabel Retribusi Daerah (RD) sebesar 0.243794, berarti bahwa setiap peningkatan suatu pengungkapan Retribusi Daerah maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.243794 dengan asumsi independen lainnya bernilai konstan (tetap). Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0.321198, berarti bahwa setiap peningkatan suatu pengungkapan Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.321198 dengan asumsi independen lainnya bernilai konstan (tetap). Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0.107260, berarti bahwa setiap peningkatan suatu pengungkapan Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.107260 dengan asumsi independen lainnya bernilai konstan (tetap).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Berikut adalah tabel deskripsi data statistik variabel yang digunakan:

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	BM	PD	RD	DAU	DAK
Mean	27.04094	26.48719	24.36563	27.47500	25.71969
Median	26.90000	26.68000	24.32500	27.55500	25.85500
Maximum	28.20000	28.28000	25.82000	27.82000	26.85000
Minimum	25.86000	24.12000	22.87000	26.97000	22.35000
Std. Dev.	0.639493	1.361520	0.951271	0.300880	1.028853
Skewness	0.124406	-0.219509	-0.138904	-0.334800	-1.456959
Kurtosis	2.128152	1.604391	1.622474	1.403149	5.092677
Jarque-Bera	1.096035	2.853949	2.633005	3.997732	17.16029
Probability	0.578095	0.240034	0.268071	0.135489	0.000188
Sum	865.3100	847.5900	779.7000	879.2000	823.0300
Sum Sq. Dev.	12.67747	57.46585	28.05239	2.806400	32.81470
Observations	32	32	32	32	32

Sumber: Hasil Olahan *Eviews 9*

Nilai mean tertinggi dalam variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 27.47500, sementara variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai mean terendah yaitu sebesar 25.71969. Median tertinggi dalam variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 27.55500, sementara variabel Retribusi Daerah (PD) memiliki median terendah yaitu sebesar 24.32500. Maximum tertinggi dalam variabel Pajak Daerah (PD) yaitu sebesar 28.28000, sementara variabel Retribusi Daerah (RD) memiliki maximum terendah yaitu sebesar 25.82000. Minimum tertinggi dalam variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 26.97000, sementara variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki minimum terendah yaitu sebesar 22.35000.

Nilai standar deviasi tertinggi dalam variabel Pajak Daerah (PD) yaitu sebesar 1.361520, yang menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah (PD) beresiko lebih tinggi diantara dengan variabel-variabel lainnya. Sebaliknya, bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) beresiko paling rendah, yakni sebesar 0.300880.

Hasil pengujian berikutnya adalah tentang suatu distribusi data simetris (distribusi normal) adalah nol yakni Skewness. Jika memiliki nilai positif, maka distribusi datanya lebih condong kearah ke sisi kanan. Namun, jika memiliki nilai negatif, maka distribusi datanya lebih condong kearah ke sisi kiri (Winarno, 2015). Selanjutnya, hasil uji yang mengartikan bahwa standar suatu data jika telah dikatakan bahwa data telah terdistribusi dengan normal sebesar nilai 3 adalah hasil uji kurtosis. Gejala leptokurtis dalam uji ini terjadi apabila nilai kurtosis melebihi 3. namun, jika terjadi gejala platykurtic apabila nilai kurtosis kurang dari 3 (Winarno, 2015).

Berdasarkan hasil pengujian untuk mendapatkan model regresi data panel yang layak maka dapat disimpulkan bahwa commom effect model (CEM) akan digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi pengaruh variabel-variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen. Terdapat 4 Kabupaten dan 4 Kotamadya dijadikan populasi dalam penelitian ini selama periode 2015-2018.

Tabel 5. Hasil Uji *Multikolinnieritas*

	BM	PD	RD	DAU	DAK
BM	1.000000	0.798235	0.797478	0.226959	0.191124
PD	0.798235	1.000000	0.600756	-0.205464	-0.159105
RD	0.797478	0.600756	1.000000	0.265080	0.063492
DAU	0.226959	-0.205464	0.265080	1.000000	0.643058
DAK	0.191124	-0.159105	0.063492	0.643058	1.000000

Sumber: Hasil Data Diolah Eviews 9

Setelah dilakukan pengujian multikolinearitas didapatkan hasil korelasi yang didapatkan bahwa data tidak ada yang memiliki nilai koefisien yang lebih besar, dan bahkan semua koefisien korelasi variabel berada dibawah nilai 0,8. Dengan begitu dapat diartikan bahwa hasil pengujian tersebut tidak ada mengalami gejala multikolinearitas karena hasil nilai koefisien antar variabel independen penelitian yang digunakan berada dibawah nilai 0,8 (Eksandy & Heryanto, 2017).

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	31.05364	28	0.3147
Pesaran scaled LM	-0.660985		0.5086
Pesaran CD	1.676426		0.0937

Sumber: Hasil Data Diolah Eviews 9

Selanjutnya, hasil pengujian heteroskedastisitas didapatkan hasil dengan nilai Prob. *Bruesch-Pagan* LM dengan menunjukkan nilai sebesar 0.3147, yakni dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05,

sehingga dapat diartikan bahwa model regresi data panel tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Estimasi *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.569048	5.237896	0.299557	0.7668
PD	0.300074	0.047095	6.371645	0.0000
RD	0.243794	0.069100	3.528151	0.0015
DAU	0.321198	0.225484	1.424480	0.1658
DAK	0.107260	0.057927	1.851649	0.0750
R-squared	0.866461	Mean dependent var		27.04094
Adjusted R-squared	0.846678	S.D. dependent var		0.639493
S.E. of regression	0.250402	Akaike info criterion		0.211105
Sum squared resid	1.692936	Schwarz criterion		0.440126
Log likelihood	1.622316	Hannan-Quinn criter.		0.287019
F-statistic	43.79707	Durbin-Watson stat		2.404678
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Data Diolah *E-views 9*

Berdasarkan pengujian terhadap uji F didapatkan bahwa nilai *F-statistik* yakni 43.79707, sedangkan *F-tabel* yang didapatkan yakni sebesar 2.73, dengan kriteria tingkat = 5%, $df_1 (5-1) = 4$ dan $df_2 (32-5) = 27$. sehingga dapat terlihat bahwa nilai *F-statistic* 43.79707 > *F tabel* 2.73 dan nilai Prob (*F-statistik*) 0,000000 < 0,05, telah sesuai dengan standar kelayakan model yang digunakan. Selanjutnya, hasil pengujian uji *Adjusted R-squared*. menampilkan bahwa nilai *R-Adjusted Squared* adalah sebesar 0.846678, yang memiliki makna bahwa variasi dinamika pergerakan naik turunnya Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel – variabel eksogen dengan nilai kontribusi sebesar 84,66 %, sedangkan sisanya yaitu sebesar 15,34% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak menjadi pengamatan dalam pembahasan ini.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis pengujian t-statistik didapatkan suatu temuan yakni hipotesis 1 dapat diterima. hal tersebut dapat diketahui dari hasil perbandingan t-statistic

6.371645 > t-tabel 2.05183 atau dari nilai Prob. 0.0000 < 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pajak Daerah dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian tersebut dapat dibuktikan dari daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2018 yang memiliki Pajak Daerah tertinggi dan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Karena dapat disimpulkan bahwa ukuran besar kecilnya suatu Pajak Daerah dapat berdampak terhadap Belanja Modal, jika semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka hal tersebut akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendistribusikan/mengalokasikan pendapatan pajak tersebut kedalam sektor Belanja Modal. Dengan begitu pembangunan dalam berbagai aspek fasilitas di daerah ini nantinya akan berujung kepada terciptanya kemandirian di setiap daerah.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlan & Dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa Pajak Daerah berpengaruh Negatif akan tetapi penelitian ini sejalan dengan hasil Hasbullah (2017) menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh Positif terhadap Belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini mendukung hasil dari teori Stewardship yang menggambarkan tentang eksistensi pemerintah daerah dalam menyejahterahkan masyarakatnya.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis pengujian t-statistik didapatkan suatu temuan yakni hipotesis 2 dapat diterima. hal tersebut dapat diketahui dari hasil perbandingan t-statistic 3.528151 > t-tabel 2.05183 atau dari nilai

Prob. $0.0015 < 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Retribusi Daerah dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian tersebut dapat dibuktikan dari daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2018 yang memiliki Retribusi Daerah tertinggi dan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Adanya peningkatan iuran retribusi daerah, yang diikuti oleh banyaknya terminal di setiap daerah berdampak kepada peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah yang dimana nantinya penggunaan pungutan tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal agar tercipta pelayanan yang lebih baik agar masyarakat dapat beraktivitas dengan kendaraan umum yang aman dan nyaman.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Jennie, 2016) menunjukkan hasil bahwa Retribusi Daerah berpengaruh Negatif akan tetapi penelitian ini sejalan dengan hasil (Ramlan & Dkk, 2016) menunjukkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian ini mendukung hasil dari Theory Stewardship yang menggambarkan eksistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyejahterahkan masyarakatnya

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis pengujian t-statistik didapatkan suatu temuan yakni hipotesis 3 ditolak. hal tersebut dapat diketahui dari hasil perbandingan t-statistic $1.424480 < t\text{-tabel } 2.05183$ atau dari nilai Prob. $0.1658 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Bahwasannya provinsi yang mendapatkan anggaran DAU dengan nilai cukup besar tentu akan lebih cenderung memiliki tanggungan belanja modal yang besar pula. Namun, masih terdapat ketidak-efektifan pemerintah dalam menggunakan kontribusi DAU terhadap belanja modal. Di lain hal, penggunaan anggaran DAU diduga dialokasikan untuk membiayai belanja yang lain mungkin saja seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Sudika & Budiarta, 2017) dimana dijelaskan bahwa DAU berpengaruh Positif terhadap alokasi Belanja Modal. akan tetapi penelitian ini sejalan dengan hasil (Prasetya, 2017) menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh Negatif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan Theory Stakeholder dimana Pemerintah selaku pemegang kekuasaan seharusnya menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis pengujian t-statistik didapatkan suatu temuan yakni hipotesis 4 ditolak. hal tersebut dapat diketahui dari hasil perbandingan t-statistic $1.851649 < t\text{-tabel } 2.05183$ atau dari nilai Prob. $0.0750 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis pengujian t-statistik didapatkan suatu temuan yakni hipotesis 3 dapat ditolak. atau dengan kata lain bahwa variabel Retribusi Daerah dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Hal ini dikarenakan faktor atas rendahnya penerimaan DAK yang didapatkan oleh pemerintah daerah sehingga diduga nilai DAK yang diterima pemerintah daerah, tidak dapat mencukupi akan kebutuhan daerahnya dalam hal Belanja Modal. Pada dasarnya anggaran DAK nantinya akan dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur di daerah, namun rendahnya penerimaan DAK dari pemerintah pusat menjadi kendala pemerintah daerah untuk mencukupi peningkatan Belanja Modal.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Ramlan & Dkk, 2016) dimana dijelaskan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. akan tetapi penelitian ini sejalan dengan hasil (Napitu & Dkk, 2018) Dana Alokasi Khusus berpengaruh Negatif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan Theory Stakeholder dimana Pemerintah selaku pemegang kekuasaan seharusnya menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akan keterkaitan PD, RD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal yang diinterpretasikan dalam LRA dan pengeluaran Belanja kabupaten / kota di provinsi Banten pada tahun 2015-2018. Adapun kesimpulan yang didapati Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dikemukakan diatas bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Implikasi

PD dan RD membuktikan adanya keterhubungan besarnya suatu Belanja Modal. Sehingga pendapatan tersebut mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam program kerjanya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang dicerminkan melalui pembangunan daerah khususnya sarana infrastruktur dan fasilitas publik yang ada di daerah baik kota ataupun kabupaten yang tersebar di Provinsi Banten. Sedangkan Dan besarnya penerimaan Dana Alokasi Umum yang di terima daerah masih belum dapat mencukupi dalama rangka untuk digunakan kedalam Belanja Modal. Sehingga dapat diartikan bahwa kontribusi DAU terhadap belanja modal tidak terlalu mencukupi keefektifannya. Tetapi, DAU diindikasikan dialokasikan kedalam pembiayaan belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Sedangkan DAK karena prosentase yang diberikan pemerintah pusat dianggarkan tidak banyak, maka DAK diindikasikan tidak menjadi faktor penentu alokasi belanja modal yang merupakan special grant, untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi, DAK secara fungsi memang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan pembangunan infrastrukturnya, namun dikarenakan alasan tersebut menyebabkan pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan DAK ke dalam Belanja Modal.

Keterbatasan

Laporan yang di dapat tidak semua Provinsi yang sudah melaporkan data sehingga masih harus menunggu Upload terbaru. Variabel yang digunakan sudah baik namun masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja modal seperti pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi

Saran Teoritis

Agar menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya serta pembandingan untuk menambah khasanah pengetahuan terutama dibidang akuntansi Publik, khususnya mengenai tema Belanja Modal.

Saran Praktisi

Bagi Penulis dan Peneliti berikutnya

Temuan penelitian ini masih dimungkinkan akan mengalami perubahan hasil ditahun selanjutnya karena sifat dari penelitian itu sendiri adalah akan selalu tidak sempurna, tidak ada hasil yang akan selalu pasti disetiap tahunnya terutama data yang bersumber dari laporan keuangan. Belum lagi adanya perubahan arah –arah kebijakan pemerintah tentang pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Banten. Ada baiknya jika penelitian ini tetap terus dilanjutkan dari tahun ke tahun. Dengan ditambah variabel baru agar penelitian berikutnya semakin bervariasi dalam menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Untuk Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat menggali lagi sumber pendapatan guna mengalokasikan lebih besar terhadap Belanja Modal, dengan adanya pendapatan yang lebih besar diharapkan pemerintah tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap pemrintah Pusat, dan diharapkan alokasi DAU dan Dak dapat terfokuskan untuk biaya Belanja Modal guna mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64

- Eksandy, A. (2018). *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen*. Tangerang.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasbullah, R. N. (2017). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian belanja modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah periode 2012-2014).
- Hendaris, R. B., & Rahayu, H. T. (2012). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten/Kotamadya Se- Jawa Barat).
- Jati, K., W. Subowo, Ilmiyana, W. et.al. 2019. The Effects of PAD, DAU, and Employee Expenses on Capital Expenditures with Population Density as a Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi (JDA)*. Vol. 11, No. 2, September 2019, pp. 132-140
- Jennie, I. (2016). *Alokasi Belanja Modal Program Studi Akuntansi*.
- Kawedar, W., & Dkk. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: UNDIP.
- Mamonto, S. Y., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2013). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013) *Sandry*. 1–14.
- Napitu, A. E., & Dkk. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal (Studi empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2013 - 2016). 5(3), 3358–3365.
- Prasetya, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia).

- Putro, P. U. W. (2013). Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variable Intervening.
- Ramlan, & Dkk. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh.
- Sianutri, A. (2010). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali. 21, 1689–1718.
- Widarto, M. P. (2013). *Penelitian Ex Post Facto*. 1–8.
- Winarmo, wing W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yulianto, Y.A. (2011). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

PROFIL SINGKAT

Dirvi Surya Abbas adalah Dosen Tetap Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekaligus Associate Editor Jurnal Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

Arry Eksandy adalah Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekaligus Editor In Chief Jurnal Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

Imam Hidayat adalah Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekaligus Associate Editor Jurnal Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

Nadia Larasati adalah alumni Mahasiswi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan tahun 2019.